

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kawasan Timur Tengah adalah kawasan dimana kasus kelangkaan air paling banyak dijumpai di dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari FAO AQUASTAT tahun 2015, jumlah air terbarukan yang dimiliki oleh Timur Tengah sebanyak 484 km³ (FAO, 2015: 1). Angka ini kecil sekali bila dibandingkan dengan kawasan Amerika Selatan yang memiliki jumlah air terbarukan terbanyak di dunia, yaitu 12.724 km³. Hal tersebutlah yang membuat setidaknya lebih dari 60% masyarakat Timur Tengah hidup di daerah dengan ketimpangan permintaan dan ketersediaan air tinggi atau bahkan sangat tinggi (World Bank, 2017: 1). Kondisi ini membuat kawasan Timur Tengah rentan terhadap kelangkaan air.

Jumlah air yang sangat terbatas tersebut, secara alami dipengaruhi oleh kondisi alamnya yang kering kemudian diperparah akibat dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi di muka bumi. Suhu udara yang meningkat serta curah hujan yang rendah berpengaruh pada tingkat penyusutan sumber air, kekeringan, dan meningkatnya potensi desertifikasi atau penggurunan (Adamo dan Al-Ansari, 2018: 8).

Selain karena kondisi alam, faktor non alam seperti melonjaknya permintaan air yang tidak dibarengi dengan sistem pengelolaan yang baik membuat kepemilikan air hampir sama berharganya dengan minyak. Manajemen penggunaan air yang kurang efisien dimana institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan

air pada tiap-tiap negara di Timur Tengah memiliki pola kerja yang hampir serupa, yaitu alih-alih menciptakan mekanisme penggunaan air yang berkelanjutan, institusi-institusi ini bekerja didorong oleh pemenuhan kebutuhan air yang sejatinya akan terus meningkat (Khater *et al.*, 2013: 7). Alhasil, selama periode pertumbuhan penduduk di kawasan Timur Tengah tahun 1982-2012, telah terjadi pengurangan jumlah rata-rata dari total air sumber daya air per kapita sebesar 50% (ESCWA, 2015: 16).

Tak berhenti sampai disitu, sebagian besar negara-negara di Timur Tengah bergantung pada sungai lintas negara yang digunakan bersama sebagai sumber utama pasokan air. Adanya sungai lintas negara yang digunakan sebagai sumber air bersama oleh negara-negara di Timur Tengah menciptakan dinamika hubungan antar negara. Salah satu contohnya adalah Turki, Suriah, dan Irak. Ketiga negara ini terhubung oleh Sungai Tigris dan Efrat dimana Turki adalah hulunya dan Irak adalah hilirnya.

Sungai Tigris dan Efrat merupakan salah satu sungai besar yang ada di kawasan Timur Tengah. Sungai tersebut berhulu di Turki kemudian mengalir melewati Suriah yang selanjutnya masuk ke Irak dan bermuara di Shatt al-Arab (lihat gambar 1.1). Lokasinya yang dilalui Sungai Tigris dan Efrat, Turki, Suriah, dan Irak sejatinya kaya akan sumber daya air dan menjadi daerah yang subur. Seiring berjalannya waktu, baik Turki, Suriah, dan Irak sama-sama tergolong sebagai negara yang memiliki jumlah populasi lebih padat ketimbang wilayah lainnya di Timur Tengah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini akan berpengaruh pada melonjaknya permintaan air, sehingga untuk memenuhi kebutuhan

masyarakatnya, masing-masing negara akan berusaha sebaik mungkin memilih langkah untuk memanfaatkan Sungai Tigris dan Efrat sebesar-besarnya. Membangun bendungan merupakan salah satu bentuk implementasinya.

Gambar 1.1 Peta Aliran Sungai Tigris dan Efrat



Sumber : Britannica Kids (2012:1)

Turki, yang mana adalah tempat bersumbernya Sungai Tigris dan Efrat, mengambil langkah untuk membangun proyek hidrologi bendungan sebagai upaya menjaga ketersediaan air di wilayahnya. Proyek ini bernama *Southeastern Anatolia Project* (*Güneydoğu Anadolu Projesi*, GAP), merupakan proyek pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas 22 bendungan dan 19 PLTA. Suriah, yang

merupakan negara tengah yang dialiri Sungai Tigris dan Efrat, juga memiliki beberapa bendungan yang dibangun untuk memaksimalkan pemanfaatan sungai. Tabqa atau Tabaka adalah bendungan utama Suriah yang didirikan di Sungai Efrat. Selain Tabqa, ada pula bendungan besar seperti Tersanah, Teshreen dan Muhardah (Al-Ansari, Ali dan Knutsson, 2014:1072).

Sayangnya, pembangunan bendungan ini berpengaruh terhadap pengurangan jumlah air yang dapat dimanfaatkan oleh negara yang berada diposisi hilir, yaitu Irak. Proyek bendungan Turki setidaknya berpotensi mengurangi 40% aliran air Sungai Efrat di Suriah (Ozkahraman, 2017:418). Karena jumlah air yang masuk ke bendungannya berkurang akibat bendungan yang didirikan oleh Turki di hulu sungai, air yang nantinya dilepaskan menuju Irak pun berkurang.

Akibatnya, Irak harus menghadapi ketimpangan antara permintaan dan persediaan air yang ada. Ketimpangan yang terjadi menyebabkan masalah krisis air di Irak yang kemudian berdampak pada banyak sektor kehidupan, misalnya seperti masalah ketahanan pangan dan masalah kesehatan yang disebabkan karena kekurangan air atau mengkonsumsi air tidak layak. Hal tersebut mendorong Irak mengecam tindakan Turki yang menggunakan Sungai Tigris dan Efrat tanpa memerdulikan negara hilir sungai. Tindakan Turki ini terjadi pasalnya tidak ada perjanjian yang mengatur terkait pembagian air di Sungai Tigris dan Efrat.

Sejumlah penelitian terkait isu pembagian air antara negara tepi Sungai Tigris dan Efrat sendiri telah dibahas dalam artikel jurnal. Adapun artikel jurnal yang membahas mengenai topik tersebut sepanjang tahun 2015-2020 sebagai

berikut: Al-Ansari dalam *Hydro-Politics of the Tigris and Euphrates Basins* pada jurnal *Engineering*, 8(3): 140-172 membahas sumber air bersama di Sungai Tigris dan Efrat dapat menimbulkan konflik antara negara tepi sungai, yaitu Turki sebagai negara hegemon akibat posisi geografis dan kekuataannya serta Irak dan Suriah sebagai negara hilir sungai yang berusaha memastikan kuantitas air mengalir di Sungai Tigris dan Efrat dapat memenuhi kebutuhan mereka. Ketiga negara tersebut tidak pernah sepakat untuk bekerja sama dalam pembagian air yang menyebabkan ketiadaan perjanjian yang jelas tentang bagaimana pembagian air seharusnya dilakukan (Al-ansari, 2016).

Al-Muqdadi *et al* (2016) dalam *Dispute over Water Resources Management-Iraq and Turkey* pada *Journal of Environmental*, 7(8): 1096-1103 menuliskan penjelasan lebih lanjut terkait sengketa sumber daya air Turki dan Irak. Irak menuduh Turki memiliki agenda politik air dibalik proyek hidrologi mereka di Sungai Tigris dan Efrat. Tulisan ini memberikan rekomendasi kepada Irak dengan menyarankan pembentukan badan nasional *Iraqi Water Security Council* (IWSC). Tujuan dari IWSC disini diharapkan mampu mencakup tantangan internal dan eksternal yang berkenaan dengan sumber daya air, seperti resiko kehilangan pembagian air dan manajemennya, serta mendorong negosiasi yang lebih sehat antara Turki dan Irak (Al-Muqdadi *et al.*, 2016).

Menurut Kibaroglu (2017) dalam tulisannya *Euphrates-Tigris River Basin : Water Management as Conflict Prevention* pada *Orient*, 58: 18-26, tantangan dalam tercapainya kerja sama antara Turki, Suriah dan Irak adalah orientasi kebijakan air lintas batas mereka berbeda. Turki berkeinginan untuk menjadi pihak

yang menentukan apa yang diperlukan serta mengatur bagaimana sumber air tersebut seharusnya dialokasikan di tiap-tiap negara, sedangkan Irak dan Suriah berpendapat harus ada kesepakatan antara mereka terkait kebijakan pembagian air (Kibaroglu, 2017).

Von Lossow (2018) dalam *More than Infrastructure : Water Challenges in Iraq* yang dipublikasikan pada *Clingendael: Netherlands Institute of International Relations: 1-10* menambahkan lewat tulisannya dimana Ia lebih menekankan pada tantangan yang dihadapi Irak terkait ketersediaan air mereka, baik secara eksternal maupun internal. Kondisi alam yang gersang, pertumbuhan penduduk, serta kurang efisiennya penggunaan air dikatakan menjadi tantangan internalnya sehingga membutuhkan modernisasi infrastruktur pengelolaan air. Sedangkan, tantangan eksternal yang paling berpengaruh yang harus dihadapi Irak adalah pembangunan GAP oleh Turki. Letak Turki yang berada di hulu sungai membuat Turki mendominasi politik air dan menjadi hidro-hegemon yang menguasai Tigris dan Efrat (von Lossow, 2018).

Bilgen (2018) dalam tulisannya *Turkey's Southeastern Anatolia Project (GAP) : A Qualitative Review of the Literature* pada *British Journal of Middle Eastern Studies*, 47(7): 652-671, menjabarkan hasil studi terkait penelitian pembangunan dan perkembangan GAP selama kurun waktu 2012-2017 pada bidang teknik, sosial dan ekonomi serta politik. Selama periode tersebut ditemukan bahwa pada bidang teknikal, riset mengenai energi dan irigasi dibahas secara komprehensif. Sedangkan, riset yang berkenaan dengan kehutanan dan peternakan menjadi topik yang dibahas secara terbatas bila dibandingkan dengan topik teknikal

lainnya. Bidang sosial dan ekonomi menjadi bidang yang sering menjadi sorotan dalam pembangunan dan perkembangan GAP, topik yang dibahas seperti kelemahan dan konsekuensi negatif dari proyek tersebut serta dampak pembangunan GAP terhadap warisan sejarah dan budaya masyarakat di kawasan pembangunan. Topik dampak ekologi dari pembangunan GAP kurang begitu dibicarakan dalam bidang ini. Tak kalah dari bidang sosial dan ekonomi, pembahasan pada bidang politik juga menerima sorotan, topik yang diteliti misalnya hubungan antara pembangunan GAP dan Kurdi, dampak GAP pada aliran air di Sungai Tigris dan Efrat serta dampaknya pada hubungan Turki, Suriah, dan Irak. Hubungan antara negara sungai akibat pembangunan GAP merupakan topik yang bisa dibilang cukup terbatas (Bilgen, 2018)

Al-Muqdadi (2019) dalam penelitiannya yang lain *Developing Strategy for Water Conflict Management and Transformation at Euphrates–Tigris Basin* pada MDPI:Water, 11(10): 2037, berbicara dampak pembangunan GAP yang lebih berfokus pada dimensi politik serta mencoba untuk mengembangkan strategi yang bertujuan mendorong transformasi konflik menjadi kolaborasi dengan melakukan negosiasi. Perdebatan mengenai pembagian air selama bertahun-tahun telah menghambat proses menuju kesepakatan, maka dari itu negara-negara hilir sungai alih-alih melihat hubungan mereka dengan Turki sebagai suatu masalah, Suriah dan Irak hendaknya melihat hubungan mereka dengan Turki sebagai hubungan yang menguntungkan. Sebab, dengan adanya GAP negara hilir sungai terdorong agar menggunakan teknologi yang lebih inovatif serta semakin maju dalam pengelolaan

air terintegrasi. Sebaliknya, Turki juga harus melihat negara hilir sungai sebagai mitranya. (Al-Muqdadi, 2019).

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, disebutkan bahwa ketiadaan perjanjian yang mengatur pembagian air di Sungai Tigris dan Efrat adalah masalah utama dari penggunaan sumber air bersama yang dapat menyebabkan kesulitan air pada negara hilir. Ketiadaan perjanjian yang mengatur pembagian air mendorong Turki sebagai negara hulu sungai untuk memanfaatkan sumber air sebesar-besarnya dengan membangun proyek hidrologi bernama GAP. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak menyebutkan apa yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak tercapai. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian penulis berniat untuk memahami alasan dibalik tidak tercapainya perjanjian pembagian air antara Turki, Suriah, dan Irak di Sungai Tigris dan Efrat.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa perjanjian pembagian air Sungai Tigris dan Efrat antara Turki, Suriah, dan Irak tidak tercapai?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Mengetahui penyebab tidak tercapainya perjanjian pembagian air antara Turki, Suriah, dan Irak.

1.3.2. Mengetahui dinamika hubungan Turki, Suriah, dan Irak yang ditimbulkan dari penggunaan sumber air bersama.

1.3.3. Mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Turki, Suriah, dan Irak terkait penguraian masalah pembagian air di Sungai Tigris dan Efrat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Memberikan pemahaman tentang tidak tercapainya perjanjian antar negara, dalam hal ini antara Turki, Suriah, dan Irak, dengan menggunakan kerangka teori Neorealisme.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Memberikan gambaran dinamika hubungan antar negara yang menggunakan sungai lintas negara sebagai sumber air bersama serta upaya-upaya yang telah ditempuh oleh negara dalam mengatur pemanfaatannya.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1. Neorealisme

Penggunaan sumber air secara bersama, pada dasarnya, dapat menciptakan dua tipe hubungan antar negara-negara penggunanya. Entah itu pola berbentuk kerja sama atau pola konflikual. Pokok kajian tulisan ini sendiri berfokus pada upaya menjelaskan fenomena dibalik tidak tercapainya kerja sama antara Turki, Suriah, dan Irak terkait pembagian air di Sungai Tigris dan Efrat. Berbicara masalah kerja sama antar negara, bisa dikatakan tidak ada satupun teori yang bisa dijadikan patokan dalam menjelaskan segala kemungkinan dalam kerja sama. Adapun untuk membantu dalam proses menjabarkan fenomena tidak tercapainya perjanjian

pembagian air antara Turki, Suriah, dan Irak ini, akan digunakan Teori Neorealisme sebagai petunjuk untuk menemukan jawabannya.

Neorealisme merupakan teori cabang dari aliran Realisme yang dicetuskan oleh seorang pemikir bernama Kenneth Waltz melalui bukunya yang berjudul *Theory of International Politics* tahun 1979. Teori ini masih menganut elemen-elemen dasar Realisme, yaitu pertama, negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Hal ini menjadikan negara satu-satunya yang punya wewenang mengeluarkan kebijakan politik yang berdampak internasional. Namun demikian, Realisme tidak menolak keberadaan aktor selain negara seperti organisasi internasional. Aktor-aktor non negara memainkan peran penting, tetapi pada akhirnya negaralah yang menentukannya (Rosyidin, 2020: 30). Kedua, negara merupakan aktor yang rasional. Ketiga, memandang struktur internasional bersifat anarki. Keempat, meyakini bahwa hubungan internasional pada dasarnya bersifat konfliktual dan penuh akan persaingan. Kelima, keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara merupakan prioritas utama suatu negara (Jackson dan Sorensen, 2013: 145-147).

Meskipun berangkat dari asumsi dasar yang sama, Neorealisme mengabaikan pertimbangan sifat dasar manusia yang buruk dan jahat sebagai penyebab hubungan internasional konfliktual dan penuh persaingan seperti yang ditekankan pada Realisme. Aliran ini percaya bahwa sistem dunia internasional yang anarki-lah yang mendorong negara untuk mengambil langkah dengan cara-cara tertentu. Sistem anarki yang dimaksud adalah ketiadaan otoritas di atas negara, bahwa negara merupakan unit politik independen yang tidak memiliki otoritas

sentral di atas mereka. Hal ini terjadi karena negara-negara mempunyai kedaulatan dan kedaulatan ada karena ketiadaan badan hukum yang mengatur negara-negara dalam sistem internasional. Dengan kata lain, tidak ada pemerintahan diatas pemerintahan. Mengutip pernyataan Mearsheimer dalam tulisannya *The False Promise of International Institution* (1994) kondisi anarki ini menghasilkan tiga pola utama perilaku negara yaitu, dalam sistem internasional negara selalu diliputi kecemasan, kecurigaan, dan ketakutan satu sama lain, sehingga sangat sedikit ruang untuk kepercayaan antar negara. Kedua, dalam mencapai keamanan nasional serta menjaga kelangsungan hidupnya negara harus mengandalkan dirinya sendiri. Sebab, negara lain dianggap sebagai ancaman potensial dan tidak ada otoritas yang dapat menyelamatkan mereka apabila suatu negara menghadapi bahaya. Kenneth Waltz menamai konsep tersebut sebagai *self-help*. Cara terbaik untuk mencapai rasa aman adalah dengan memastikan diri menjadi yang terkuat. Terakhir, dalam sistem internasional negara akan selalu berusaha memaksimalkan posisi kekuatan relatif mereka pada negara lain, yang mana mereka akan mencari peluang untuk memanfaatkan negara lain dan memastikan bahwa negara lain tidak mengambil untung dari mereka (Mearsheimer, 1994: 11).

Struktur internasional anarki ini membuat Neorealisme memandang pesimis kerja sama antar negara. Pesimisme Neorealis terhadap kerja sama antar negara bukannya berarti bahwa kerja sama tersebut tidak dapat terjadi. Dalam pandangan Neorealisme, kerja sama antar negara bisa saja terjadi akan tetapi sulit untuk mewujudkan dan menjaga keberlangsungannya. Hal tersebut dikarenakan ketiadaan otoritas yang kedudukannya lebih tinggi daripada negara yang dapat

memaksa suatu negara untuk tunduk pada suatu kerja sama. Ditambah lagi, pada situasi yang anarki cenderung memupuk persaingan antar negara dalam memperebutkan keamanan yang sifatnya terbatas sehingga menghambat kesediaan mereka bekerja sama. Berbeda dengan pandangan kaum Neorealis, Neoliberalisme punya cara pandang lain dalam melihat potensi kerja sama antar negara dalam situasi yang anarki. Kaum Neoliberalis melihat kondisi internasional yang anarki bukanlah hambatan bagi negara untuk melakukan kerja sama, justru mereka akan mencari jalan dalam menghadapi masalah bersama. Maka dari itu, Neoliberalis memperkenalkan institusi yang merupakan aturan-aturan yang mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu. Aturan-aturan tersebut dapat disebut pula sebagai rezim (Jackson dan Sorensen, 2013: 192-193).

Neoliberalis yakin bahwa institusi mampu memfasilitasi kerja sama dengan cara menyediakan informasi yang berkaitan tujuan atau maksud negara secara transparan, yang mana dapat memperkecil peluang negara untuk menipu satu sama lain. Namun, masalah utama yang dipahami kaum Neorealisme terhadap sulitnya kerja sama ini tak hanya semata-mata ketakutan sebuah negara dicurangi oleh negara lainnya, melainkan juga pertimbangan keuntungan relatif atau *relative gains*. Karena negara merupakan aktor yang rasional, dalam menjalin kerja sama, negara-negara akan selalu mempertimbangkan keuntungan yang akan didapat dari kerja sama tersebut. Dalam pertimbangan pembagian keuntungan, suatu negara dapat berpikir dengan dua cara yang berbeda yaitu melalui konsep berpikir keuntungan absolut (*absolute gains*) atau keuntungan relatif (*relative gains*).

Konsep keuntungan absolut membuat negara hanya menghiraukan keuntungan yang akan mereka dapatkan dengan tidak terlalu menghiraukan keuntungan yang didapatkan oleh negara lain. Artinya, negara memfokuskan diri mereka untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat dari kerja sama. Sedangkan, pada konsep keuntungan relatif, dalam mempertimbangkan sebuah kerja sama, negara tidak hanya mempertimbangkan keuntungan yang akan mereka dapatkan, tetapi mereka juga memperhatikan keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak lain. Cara berpikir ini kemudian dilanjutkan dengan membandingkan seberapa besar atau seberapa baik keuntungan yang mereka dapatkan apabila disandingkan dengan keuntungan yang didapatkan oleh negara lain dalam sebuah kerangka kerja sama. Potensi terjalannya sebuah kerja sama akan lebih besar apabila semua negara anggota kerja sama berpikir dengan konsep keuntungan absolut. Masalahnya, kondisi dunia yang anarki tidak memberikan jaminan apapun pada negara bahwasannya negara anggota lainnya bukanlah ancaman bagi mereka di masa depan dan tidak sedang memanfaatkan mereka untuk mengambil keuntungan. Hal ini yang membuat negara cenderung berpikir dengan konsep keuntungan relatif. Kecenderungan tersebut membuat proses terjalannya kerja sama terhambat, berpikir dengan konsep keuntungan relatif membuat negara tak sekadar memastikan bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari suatu kerja sama, tetapi mereka juga akan mempertanyakan bagaimana keuntungan itu dibagi pada tiap-tiap anggota dalam suatu kerja sama (Mearsheimer, 1994: 13).

Di samping masalah kecurangan dan pembagian keuntungan relatif, Neoliberalisme harus menghadapi masalah klasik yang berkenaan dengan tingkat efektivitas suatu institusi. Neoliberalis lewat rezimnya telah menyediakan seperangkat aturan yang tujuannya adalah mengatur negara dalam bertindak di kancah internasional. Namun, kembali lagi pada argumen Neorealis, bahwa kondisi anarki yang mana tidak ada suatu otoritas yang lebih tinggi dari negara berarti tidak ada yang dapat memaksa negara untuk patuh pada aturan yang telah ada. Itu artinya negara memegang wewenang mutlak dalam memutuskan untuk tunduk atau tidak pada sebuah aturan (Rosyidin, 2020: 55).

1.5.2. Relative Gain

Berbicara kerja sama antar negara, tak bisa dipungkiri bahwa memperoleh keuntungan merupakan motivasi yang kuat bagi sebuah negara untuk menjalin kerja sama. Namun demikian, probabilitas terjalannya kerja sama antar negara dilihat berbeda-beda oleh para ahli. Ada yang berpendapat peluangnya terbuka lebar, ada pula yang menyebutkan bahwa kerja sama antar negara akan sangat sulit tercapai dan apabila tercapai pun umurnya tidak akan lama. Bagaimana negara tersebut peduli terhadap keuntungan yang akan didapatkan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi peluang tercapainya kerja sama antar negara.

Menurut pandangan kaum Neoliberalis, negara merupakan aktor yang bersifat atomistik atau aktor yang rasional dan egois. Karakter itu membuat negara hanya akan memedulikan keuntungan yang mereka peroleh serta tak acuh pada keuntungan yang didapatkan oleh pihak lain. Mereka hanya akan berfokus pada

usaha memaksimalkan keuntungan individual dari kerja sama tersebut (Grieco, 1988: 487). Cara pandang ini dapat disebut sebagai keuntungan absolut atau *absolute gains*. Kondisi inilah yang mendukung terciptanya sebuah kerja sama antar negara, sebab pihak-pihak terkait sama-sama memperoleh pertambahan keuntungan, dari yang sebelumnya tidak ada, melalui kerja sama yang terjalin.

Berbeda dari pandangan kaum Neoliberalis, kaum Realis justru beranggapan bahwa dalam kerja sama negara tak sebatas menghiraukan keuntungan individual saja, tetapi mereka juga menimbang seberapa besar keuntungan yang mereka dapat bila dibandingkan dengan pihak lainnya (Snidal, 1991: 703). Situasi ini lahir akibat struktur internasional yang anarki, dimana tidak ada otoritas di atas negara yang dapat menjamin keamanan setiap negara. Akibatnya, negara selalu merasa terancam dan menaruh kecurigaan pada negara lain. Dalam upaya mencapai keamanan, negara harus memaksimalkan kekuatan relatif mereka sembari mencegah peningkatan kekuatan relatif negara lain (Grieco, 1988: 602). Adanya kerja sama antar negara memang dapat dijadikan sebagai sarana meningkatkan kekuatan. Namun, pada satu sisi negara secara tidak langsung juga memberikan kesempatan pada negara lain untuk turut meningkatkan kapabilitas mereka dari keuntungan yang didapatkan. Maka dari itu, Realis menegaskan bahwa negara tak hanya peduli terhadap *absolute gains* tetapi juga *relative gains* (Grieco, 1988: 487) *Relative gain* merupakan sebuah kondisi bahwa dalam sebuah kerja sama negara selalu merasa pihak lain lebih diuntungkan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar dari yang mereka dapatkan. Hal itulah yang menyebabkan kaum Realis percaya apabila kerja sama antar negara sulit untuk dicapai.

Masalah *relative gains* berdampak negatif dalam upaya mencapai kerja sama antar negara. Secara garis besar masalah *relative gains* dapat mencegah negara untuk bekerja sama melalui dua cara, yaitu dengan menghambat proses terjadinya kerja sama pada tahap perundingan distribusi keuntungan dan mengubah inisiatif awal negara dari yang setuju untuk bekerja sama menjadi membatalkan kerja sama. Snidal menjelaskan bahwa *relative gains* mampu mempengaruhi negara untuk menolak bekerja sama apabila kesepakatan tersebut dianggap menciptakan keuntungan lebih besar pada pihak lain (Snidal, 1991: 703). Pihak yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar ini akan berada diposisi superior yang mana dapat mengancam mitra kerja samanya. Menambah waktu berunding untuk mencapai *absolute gains* semaksimal mungkin juga tidak akan terlalu membantu apabila negara berpikir *relative gains* sangat penting. Kemungkinan yang terjadi adalah kerja sama bisa saja tercapai, tetapi negara akan sangat membatasi komitmen mereka. Masalah *relative gains* tak bisa diabaikan, bahkan saat kesepakatan kerja sama telah tercapai. Pasalnya, negara bisa saja memilih meninggalkan kerja sama tersebut ketika dirasa kerja sama yang dilakukan telah menambah kapabilitas pihak lain yang mana, dimasa depan, bisa menjadi musuh potensial mereka (Grieco, 1988: 603).

1.5.3 Hegemoni Regional

Dalam sistem internasional yang anarki ini, perilaku negara dalam berhubungan satu sama lain merupakan bentuk respon dari ketiadaan otoritas di atas negara. Pola-pola utama perilaku negara dalam hubungan internasional, seperti menjadikan keamanan dan keberlangsungan hidup negara sebagai prioritas mereka.

Untuk mencapai posisi tersebut negara cenderung berusaha memaksimalkan kekuatan relatif mereka hingga menjadi aktor hegemon (Mearsheimer, 2001: 31). Hegemoni sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki oleh negara kuat untuk mengontrol negara lain dalam sistem tersebut (Mearsheimer, 2001: 40). Dengan menjadi aktor hegemon, negara dapat menentukan aturan main dalam hubungan antar negara (Zeitoun dan Warner, 2006: 438).

Hegemoni terbagi menjadi dua, hegemoni global dan hegemoni regional atau hegemoni pada wilayah-wilayah tertentu (Mearsheimer, 2001: 22). Mengutip pernyataan Mearsheimer, untuk menjadi hegemoni global bagaimanapun juga merupakan hal yang sulit mengingat aktor tersebut harus memproyeksikan kekuatan mereka ke seluruh dunia. Namun begitu, mencapai posisi hegemon di wilayah-wilayah tertentu atau menjadi hegemon regional sangat memungkinkan (Toft, 2005: 384). Langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh negara untuk menjadi aktor hegemon adalah dengan mengendalikan wilayah lain yang di sekitarnya (Mearsheimer, 2001: 22).

Untuk mencapai posisi hegemoni dalam rangka menjaga keamanannya, negara akan terus meningkatkan kekuatan mereka. Kekuatan yang dimaksud misalnya dapat berupa kekuatan militer, ekonomi, bahkan sumber daya alam dapat menjadi kekuatan sebuah negara. Namun demikian, negara juga dapat melancarkan serangan untuk memperoleh posisi hegemon tersebut apabila dirasa hal itu lebih menguntungkan (Mearsheimer, 2001: 439). Dalam mencapai hegemoni regional, negara yang berpotensi menjadi hegemon bukan hanya sekadar menjadi negara yang terkuat pada kawasan tersebut, tetapi juga harus memperhatikan kesenjangan kekuasaan antara pihaknya dengan negara lain terkuat kedua di kawasan.

Mearsheimer menegaskan harus ada kesenjangan nyata antara kedua negara untuk menjadi negara hegemon di kawasan. Negara hegemon regional harus memiliki kekuatan potensial yang memperbesar peluang untuk mendominasi dan mengendalikan negara lainnya. Mereka harus mempunyai peluang yang bagus untuk mengalahkan setiap lawannya sendirian (Mearsheimer, 2001: 24)

Dalam kasus hidro-hegemoni, suatu negara bisa dikatakan menjadi negara hegemon di daerah aliran sungai dengan memperhatikan kekuatan negara secara militer dan ekonomi, posisi geografis mereka pada daerah aliran sungai, di hulu atau di hilir sungai, serta kemampuan mereka dalam mengeksploitasi sumber daya (Zeitoun dan Warner, 2006: 451). Kemampuan dalam mengeksploitasi sumber daya air bisa dilakukan melalui *resource capture*, yaitu dengan melakukan pengendalian akses terhadap sumber air, misalnya dengan mendirikan infrastruktur hidrologi secara besar-besaran (Zeitoun dan Warner, 2006: 444). Adapula yang menggunakan *containment strategy*, yaitu menahan kompetitor dengan cara mengadakan perjanjian sembari tetap mempertahankan posisi asimetris melalui kekerasan, perilaku sepihak, atau menekan untuk patuh terhadap negara yang hegemon (Zeitoun dan Warner, 2006: 445).

1.6 Operasional Konsep

1.6.1. Transboundary Water / Perairan Lintas Negara

Istilah *transboundary water* atau perairan lintas negara sampai saat ini masih tumpang tindih dengan istilah *international water* yang sama-sama melewati

dan/atau dimiliki oleh beberapa negara. Perairan lintas batas negara disini bisa berupa sungai maupun danau. Menurut UN Water, perairan lintas batas negara merupakan perairan, baik danau maupun sungai, yang dimiliki oleh dua atau lebih negara. Perairan ini biasanya digunakan untuk mendukung hajat hidup orang banyak di berbagai dunia.

Pada Pasal II dalam *The Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers 1966* dijelaskan bahwa perairan lintas batas negara merupakan suatu wilayah geografis yang membentang lebih dari dua negara. Bedanya perairan yang dimaksud tak hanya yang berada di permukaan melainkan juga yang berada di bawah tanah, serta mengalir ke muara yang sama (International Law Association, 1966).

Pada Pasal 2a dan 2b dalam *The UN 1997 Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses* dijelaskan penggunaan istilah perairan lintas batas negara yang kurang lebih sama dengan *The Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers 1966* yaitu sistem air, baik air permukaan dan air tanah, yang bagian-bagiannya terletak di negara-negara yang berbeda, dimana hubungan fisiknya merupakan kesatuan yang utuh dan mengalir ke muara yang sama (UN, 1997).

Dari definisi tersebut, maka perairan lintas batas negara merupakan perairan baik yang berada dipermukaan maupun di bawah tanah, yang letaknya membentang melintasi beberapa negara dan secara fisik merupakan satu kesatuan utuh yang mengalir ke muara yang sama.

1.7 Hipotesis / Argumen penelitian

Tidak tercapainya perjanjian pembagian air antara Turki, Suriah, dan Irak disebabkan oleh sistem internasional anarki, yang ditandai dengan absennya otoritas sentral di atas negara yang dapat mengatur perilaku mereka dalam memaksimalkan pemanfaatan Sungai Tigris dan Efrat. Kondisi anarki membuat negara percaya bahwa tidak ada otoritas yang mampu menjamin negaranya terhindar dari ancaman kelangkaan air, karena hal tersebut, negara hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai keamanannya. Situasi ini memperkecil kesempatan tercapainya perjanjian pembagian air. Disamping itu, kepedulian negara terhadap *relative gains* juga menghambat proses disepakatinya perjanjian pembagian air, dikarenakan baik Turki, Suriah, dan Irak akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak meningkatkan keuntungan serta kekuatan relatif satu sama lain.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode ini sering digunakan pada rumpun ilmu sosial seperti Hubungan Internasional. Pengertian dari metode penelitian kualitatif sendiri banyak didefinisikan oleh para ahli, misalnya Denzin dan Lincoln (1994: 1) yang menekankan bahwa, “penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi alamiah dengan tujuan memahami atau menginterpretasikan sebuah fenomena.” Maykut dan Morehouse (1994: 2) berpendapat bahwa, “penelitian ini berpijak pada posisi fenomenologis, yang mana merupakan sebuah pendekatan untuk memahami makna

sebuah peristiwa.” Sedangkan menurut Patton dan Cochran (2002: 2), “pemahaman pada penelitian kualitatif berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan sosial yang dipahami menggunakan metode-metode yang secara general menghasilkan kata-kata sebagai data untuk analisis.” Secara keseluruhan, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk memahami makna dibalik fenomena sosial dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang berbentuk kata-kata.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif sebab dalam proses menjawab rumusan masalah yaitu mengapa perjanjian pembagian air antara Turki, Suriah, dan Irak tidak dapat tercapai, peneliti tidak akan memberikan perlakuan khusus terhadap objek penelitian sehingga sifatnya alamiah. Penelitian ini juga lebih menonjolkan data-data yang berbentuk kata-kata dari artikel jurnal internasional dan media dalam proses penelitiannya, selain itu akan diberikan pula data-data yang berbentuk gambar seperti peta dengan tujuan memberikan gambaran lokasi atau wilayah penelitian, yaitu Turki, Suriah, dan Irak serta aliran Sungai Tigris dan Efrat.

1.8.1. Tipe Penelitian

Mengutip pernyataan van Wyk (2003), terdapat beberapa tipe penelitian berdasarkan pertanyaan penelitiannya, yaitu eksplorasi, deskripsi, eksplanasi, prediksi, evaluasi, dan sejarah (Bakry, 2016: 98). Merujuk pada pertanyaan penelitian tulisan ini yang ingin mengetahui penyebab mengapa perjanjian air antara Turki, Suriah, dan Irak di Sungai Tigris dan Efrat sulit tercapai, maka tipe

penelitian yang cocok adalah tipe penelitian eksplanasi. Seperti yang dikemukakan oleh de Vaus (2005: 2) dalam penelitian ilmu sosial, “peneliti biasanya mengajukan dua jenis pertanyaan penelitian, yang mana berfokus pada pertanyaan apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi.” Pada jenis pertanyaan pertama yang lebih menonjolkan pada pertanyaan apa yang terjadi, tipe penelitiannya cenderung berbentuk deskriptif, sebab tujuannya adalah menjelaskan kepada pembaca terkait sebuah fenomena yang sedang terjadi secara rinci. Sedangkan, pada jenis pertanyaan mengapa hal itu terjadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami makna dibalik mengapa suatu fenomena dapat terjadi, maka dari itu tipe penelitiannya adalah eksplanasi atau menjelaskan.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk memahami makna dibalik sulit tercapainya perjanjian pembagian air antara Turki, Suriah, dan Irak, sehingga wilayah atau tempat penelitian dari tulisan ini adalah Turki, Suriah, dan Irak.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah negara Turki, Suriah, dan Irak sebagai pihak yang terlibat dalam dilema pembagian air di Sungai Tigris dan Efrat.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif cenderung didominasi oleh kata-kata, teks-teks dari uraian peristiwa atau laporan serta gambar berwujud peta dan foto yang berkenaan dengan masalah pembagian air antara Turki, Suriah, dan Irak di

Sungai Tigris dan Efrat, kemudian diterjemahkan sehingga dapat dipahami oleh pembaca.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Hal ini dikarenakan terbatasnya akses yang menjadi kendala utama dalam mendapatkan data primer. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, akan tetapi data diperoleh dari tulisan yang merujuk atau berdasarkan data primer. Berbeda dengan sumber data primer yang langsung mendapatkan data dari pihak pertama, sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui tangan kedua, seperti melalui artikel jurnal internasional dan media atau laman berita internasional.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan pengumpulan data berbasis dokumen, yang mana merupakan bahan yang menyediakan informasi terkait sebuah fenomena tertentu. Menurut Lamont (2015: 80), “terdapat dua jenis dokumen, yaitu dokumen primer dan dokumen yang berbentuk data sekunder.” Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang mengalami langsung fenomenanya atau orang yang memiliki akses langsung pada informasi terkait. Jenis dokumen ini memiliki keterbatasan dalam aksesibilitas, dimana tidak semua dokumen ini dipublikasikan dan dapat diakses oleh umum. Sedangkan, dokumen sekunder merupakan dokumen yang ditulis dengan merujuk pada dokumen atau data primer atau sudah melalui proses analisis. Jenis ini dapat menjadi alternatif bagi peneliti

yang kesulitan dalam memperoleh langsung dokumen primer. Dokumen sekunder biasanya ditemukan pada sejumlah organisasi, literatur non-fiksi, biografi, dan otobiografi serta media .

Selain itu, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode berbasis internet, dimana peneliti memanfaatkan keberadaan internet untuk mengakses materi tradisional seperti artikel jurnal ilmiah dan buku. Di samping itu, melalui internet dapat pula dikumpulkan data serta informasi yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Melalui internet, peneliti dapat mengakses dokumen resmi yang disediakan oleh pemerintah di laman resmi mereka (Bryman, 2012: 654).

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif merupakan serangkaian sistem yang melibatkan upaya pemilihan, pemilahan, dan pengorganisasian data yang telah dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu. Tujuannya adalah untuk memahaminya secara mendalam, menemukan sebuah temuan baru, yang selanjutnya dilanjutkan pada kategorisasi dan diakhiri dengan mengkonstruksi hubungan kategorisasi. Sugiyono menjabarkan proses tersebut ke dalam langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut : (1) pengumpulan data, dalam tahap ini akan dikumpulkan data-data yang relevan dengan rumusan masalah. Peneliti akan mengumpulkan data-data berupa teks maupun gambar dari dokumen seperti artikel jurnal internasional dan media yang berkaitan dan mampu mendeskripsikan dinamika hubungan Turki, Suriah, dan Irak dari penggunaan sumber air bersama. (2) Deskripsi data mentah, dalam tahap ini semua data yang telah terkumpul

ditampung. Sebelum melewati proses pemilihan dan pemilahan, data yang terkumpul ini masih berserakan yang artinya belum memiliki makna tertentu. (3) Reduksi data, merupakan proses mereduksi atau memilih data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah memilih data yang dianggap penting, unik, dan relevan dengan rumusan masalah. (4) Kategorisasi data, dalam tahap ini data akan dipilah atau dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. (5) Mengkonstruksi hubungan kategorisasi, untuk melakukan proses konstruksi dibutuhkan kerangka teori tertentu. Kerangka teori dibutuhkan karena penggunaan teori satu dengan teori lainnya akan menghasilkan konstruksi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, proses konstruksi menggunakan kerangka teori tertentu dapat menghasilkan hasil yang berbeda antara tulisan dari penulis satu dengan lainnya (Sugiyono, 2018: 167-171). Pada tahap ini, penulis akan menggunakan kerangka teori neorealisme yang diharapkan dapat menghasilkan konstruksi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya terkait topik tidak tercapainya perjanjian pembagian air antara Turki, Suriah, dan Irak di Sungai Tigris dan Efrat.

1.8.8. Kualitas Data

Untuk menjamin kualitas data yang didapatkan, penelitian ini akan menggunakan uji kredibilitas yang dilakukan dengan cara memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, serta melakukan member check. Tahap tersebut akan dijabarkan dengan mengutip dari Sugiyono, (1) memperpanjang pengamatan, yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan memfokuskan pada pengujian data yang telah diperoleh. Penulis akan menguji kembali kebenaran

dan validitas data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. (2) Peningkatan ketekunan, tak jauh berbeda dengan proses sebelumnya, hal ini dilakukan untuk menguji kembali kebenaran data dengan cara membaca berbagai referensi seperti hasil penelitian dan dokumen yang berkaitan dengan hasil temuan penelitian. (3) Triangulasi, merupakan pengecekan kualitas data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Pengecekan sumber dilakukan melalui beberapa sumber yang kemudian dianalisis dan disimpulkan oleh peneliti. Selanjutnya, pengecekan waktu dengan menguji data yang didapatkan dalam waktu yang berbeda untuk mengantisipasi adanya perubahan situasi. (4) Analisis kasus negatif, hal ini dilakukan dengan cara mencari data yang berbeda dengan data yang ditemukan. Tujuan akhirnya untuk memastikan apabila data yang bertentangan tidak ditemukan maka data yang diperoleh dianggap sudah dapat dipercaya. (5) Penggunaan bahan referensi, bahan referensi disini digunakan untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya dapat berupa foto-foto, video, rekaman suara. Namun, karena penelitian ini menggunakan teknik penelitian berbasis dokumen dan internet maka akan dicantumkan sumber-sumber data dalam bagian referensi. (6) Melakukan *member check* yang dapat dilakukan dengan datang secara langsung pada pemberi data (Sugiyono, 2018b: 185-193). Karena penelitian ini memiliki keterbatasan untuk memperoleh data secara langsung, maka proses *member check* akan dilewati.

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam menulis penelitian ini, akan disusun dan dibahas sesuai dengan rancangan berikut : Bab 1 berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka teori yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah, operasionalisasi konsep yang ada dalam penelitian, serta uraian terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, seperti tipe penelitian, situs dan subjek penelitian, jenis, sumber, serta teknik pengumpulan data, analisis serta interpretasi data, serta kualitas data.

Pada Bab II akan dijelaskan peran strategis Sungai Tigris dan Efrat bagi negara-negara di kawasan Mesopotamia. Mulai dari era Mesopotamia Kuno hingga era negara-negara modern di kawasan tersebut. Penjabaran peran strategis Sungai Tigris dan Efrat difokuskan pada sektor ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Turki, Suriah, dan Irak dalam menyelesaikan masalah pembagian air.

Bab III akan berisikan analisis penyebab tidak tercapainya perjanjian pembagian air Sungai Tigris dan Efrat antara Turki, Suriah, dan Irak dengan menggunakan kerangka teori Neorealisme.

Bab IV akan berisi kesimpulan dari jawaban penyebab tidak tercapainya perjanjian pembagian air antara Turki, Suriah, dan Irak di Sungai Tigris dan Efrat. Tak lupa juga, saran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik masalah pembagian air di Sungai Tigris dan Efrat antara negara tepi sungai.